

**ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG “KOTA
SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN”
(Studi di Kota Malang)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

ASHARI

NIM : 201610380211011

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
OKTOBER 2018**

**ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG
"KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN"**

**ASHARI
201610380211011**

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Selasa/ 25 September 2018

Pembimbing Utama



Dr Sulardi, S.H., M.Si

Pembimbing Pendamping



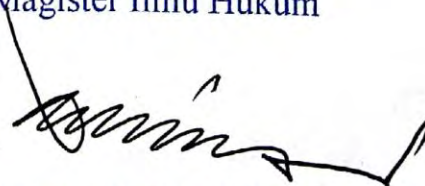
Dr Fifik Wiryani, S.H,M.Si.,M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana



Akhsanul M'Am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Mokh Najih, S.H., M.H., Ph.D

TESIS

ASHARI
201610380211011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Selasa/ 25 September 2018**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji	: Dr. Sulardi
Sekretaris / Penguji	: Dr. Fifik Wiryani
Penguji	: Dr. Haris Tofly
Penguji	: Mokh Najih, Ph.D

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ASHARI**
NIM : **201610380211011**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG “KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN”** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 September 2018

Yang menyatakan,



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Alhamdulillahirabbil alamin dengan segala rasa syukur, saya mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT karena berkat izin-NYA saya dapat menyelesaikan tesis berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN”**.

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugass ahir untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata 2 Ilmu Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Usaha yang cukup maksimal sudah saya curahkan demi terselesaikannya tesis ini, namun saya menyadari bahwa saya hanyalah manusia biasa yang masih bisa melakukan kesalahan. Begitupun tesis ini, saya pun turut menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang dan mungkin masih membutuhkan beberapa perbaikan.

Ada banyak sekali pihak yang berperan bagi saya sehingga saya bisa cepat menyelesaikan tesis ini. Rasa terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Ayah saya KAPTEN CBA SALADIN, Ibu saya YUNING WAHYUANA, adik saya MUTIA ULFA, S.E. mereka senantiasa menjadi penyemangat saya ketika saya sedang dilanda kemalasan
2. Direktur Program Pascasarjana UMM Akhsanul In'am, mantan Direktur PPS UMM Dr Latipun, M.Kes, dan jajaran staff TU PPS UMM

3. Jajaran dosen pembimbing dan penguji Dr Sulardi S.H., M.Si, Dr Fifik Wiryani S.H., M.Si., M.Hum, Mokh Najih S.H., M.H., P.hD
4. Jajaran dosen Magister Ilmu Hukum UMM
5. Sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa DANANG YUDA PRATAMA, A.Md.Pi., S.Pi , MAHENDRA EKA PUTRA, S.E, RAGA DWI MAHENDRA S.T, senantiasa menghibur saya ditengah stressnya proses penelitian
6. Ibu Endah (Disperkim) dan ibu Ratri (Barenlitbang) yang sangat membantu saya dalam memperoleh data-data yang saya butuhkan untuk menyelesaikan tesis saya.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Seluruh bentuk support yang telah diberikan membuat saya lebih kuat dan lebih percaya diri untuk sesegera mungkin menyelesaikan tesis ini dengan sebaik mungkin. Semoga tesis ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pembaca. Mohon maaf yang teramat sangat jika masih ada salah dalam penulisna ini. Ahir kata Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh..

Malang, 25 September 2018

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Abstract.....	v
Latar Belakang Permasalahan	1
Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	3
Metodologi Penelitian	
Jenis Penelitian	5
Sifat Penelitian.....	6
Data dan Sumber Data.....	6
Teknik Pengumpulan Data	
Wawancara	7
Observasi	8
Library Research.....	8
Hasil Penelitian dan Pembahasan	
Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang 2010-2030 (Penambahan Jumlah RTH).....	9
Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang	15
Upaya Perlindungan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.....	16
Kesimpulan.....	22
Saran	24
Daftar Pustaka	26

ABSTRAK

Jumlah ruang terbuka hijau yang sangat mengawatirkan di beberapa daerah khususnya di Kota Malang menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk di teliti. Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, seluruh wilayah perkotaan di Indonesia diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau seluas 30% yang kemudian prosinya dibagi menjadi 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Guna menindaklanjuti kewajiban ini, dengan dasar Perda Kota Malang No 4 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan upaya penambahan terhadap sejumlah ruang terbuka hijau dan pemanfaatan sejumlah aset Pemerintah untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Ada beberapa kebijakan yang telah ditentukan dan Pemerintah Daerah Kota Malang menargetkan hal tersebut akan rampung pada tahun 2030. Sejauh ini sudah ada langkah kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan meskipun sempat ada pro dan kontra di tengah proses pembangunan ini, hingga saat ini upaya tersebut masih terus berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : RTH, RTRW Kota Malang, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

The amount of green open space that is very worrying in some areas, especially in the city of Malang, is something very interesting to examine. Based on several laws and regulations, all urban areas in Indonesia are required to have a 30% green open space and then the proceeds are divided into 20% for public green open spaces and private green open spaces. In order to follow up on this obligation, based on the Malang City Regulation No. 4 of 2011, the Regional Government of Malang City made an effort to add a number of green open spaces and use a number of Government assets to be used as green open spaces. There are several policies that have been determined and the Regional Government of Malang City is targeting that this will be completed in 2030. So far there have been concrete steps taken by the City Government of Malang and although there have been pros and cons in the middle of this development process, effort to date it still continues in accordance with existing policies and legislation.

Keywords: RTH, Malang City RTRW, Green Open Space

Latar Belakang Permasalahan

Ruang terbuka hijau atau yang biasa disebut dengan RTH merupakan salah satu komponen penting yang harus tersedia di setiap areal perkotaan. Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun yang sengaja di tanam¹. Ruang terbuka hijau sendiri memiliki beberapa fungsi seperti fungsi ekologi, fungsi estetika/keindahan, fungsi sosial budaya, dan fungsi ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut akan semakin terlihat seiring dengan bertambahnya jumlah ruang terbuka hijau yang ada. Dalam suatu perkotaan, diwajibkan setidaknya memiliki ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas daerahnya yang kemudian dibagi menjadi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat². Dengan adanya ketentuan tersebut, tentunya setiap daerah harus memenuhi kriteria tersebut. Jika melihat pesatnya pembangunan di areal perkotaan yang notabene memiliki banyak gedung-gedung bertingkat, banyak pemukiman mulai pemukiman elit hingga pemukiman kumuh, banyak memiliki tempat pendidikan dan sarana prasarana umum lainnya, nampaknya upaya pemenuhan persyaratan tersebut akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Hingga saat ini, masih banyak kota yang luasan ruang terbuka hijaunya masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu kota yang belum memenuhi persyaratan tersebut adalah Kota Pasuruan. Pada tahun 2010, ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Pasuruan adalah seluas 4.960.942 m² atau 13,56% dari luas kota

¹ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3 angka 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

² Bab II angka 2.1 Huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

dan luasan ruang terbuka hijau privat seluas 2.359.090 m² atau 6,54 % dari total luas kota sehingga pada tahun 2010 ruang terbuka hijau yang tersedia di Kota Pasuruan adalah seluas 7.3019.743 m² atau 20,01% dari luas total Kota Pasuruan³. Dengan angka tersebut, pemerintah Kota Pasuruan masih berhutang setidaknya 6,44% untuk penambahan luasan RTH publik dan 3,56% untuk luasan RTH privat sehingga total RTH yang ada bisa mencapai angka 30% sesuai yang disyaratkan oleh pemerintah. Kondisi yang senada dengan Kota Pasuruan turut terjadi di kota yang letaknya bersebelahan dengan Kota Pasuruan yakni Kota Malang. Kota Malang memiliki luas wilayah seluas wilayah 11.006 Ha dan memiliki ruang terbuka hijau publik seluas 1.342,95 Ha⁴. Guna menutupi kekurangan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang membuat suatu Peraturan Daerah berupa rencana tata ruang wilayah yang akan diselenggarakan di Kota Malang yang akan berlangsung hingga tahun 2030. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Dalam Peraturan Daerah Tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau seperti tujuan utama penambahan ruang terbuka hijau serta target luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Malang akan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Ruang terbuka hijau perlu ditambah atau diperluas dikarenakan fungsinya yakni untuk menyerap polusi dan mencegah banjir (fungsi ekologis), sebagai sarana interaksi bagi penduduk sekitar (fungsi sosial), sebagai

³ Rizki Yuliansyah dalam jurnal "Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pasuruan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008", *jurnal swara bumi* volume IV Nomor V Tahun 2017 hlm 45

⁴ Hasil observasi dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang 22 Juni 2018

sarana untuk mempercantik lingkungan perkotaan (fungsi estetika), dan dapat digunakan sebagai tempat wisata yang berdampak pada pemasukan daerah dan pemasukan bagi warga sekitar (fungsi ekonomi. Upaya penambahan RTH tersebut dilakukan tidak lain adalah sebagai mewujudkan salah satu visi pembangunan di Kota Malang. Visi tersebut termuat dalam pasal 2 Perda RTRW Kota Malang yang berbunyi “ pembangunan di Kota Malang diarahkan menuju visi Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”. Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut terdapat beberapa visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Malang, namun jika berbicara mengenai RTH maka visi yang paling dekat dengan pembahasan tersebut adalah “ Kota Sehat dan Ramah Lingkungan”. Mengapa demikian? Karna seyogyanya jika mengkomparasikan masyarakat yang hidup di wilayah yang mempunyai kualitas lingkungan yang buruk (banyak polusi) tentunya akan sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang mendiami lingkungan yang memiliki sedikit polusi seperti di areal pedesaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengertian ruang terbuka hijau yang termuat dalam beberapa undang-undang memiliki kesamaan bunyi yakni ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam (pasal 1 angka 31 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan) .

Terdapat pengertian lain mengenai RTH yakni ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian terbuka dari suatu kawasan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi⁵. Perbedaan dalam pengertian tersebut dengan pengertian ruang terbuka hijau yang termuat dalam UU penataan ruang dan Permen PU sebelumnya adalah pengertian yang termuat dalam Permendagri No 1 Tahun 2007 adalah pengertian mengenai RTH yang berada di dalam kawasan atau areal perkotaan. Penataan ruang terbuka hijau dalam suatu daerah tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena harus memperhatikan asas-asas yang ada. Berikut merupakan asas-asas dalam hal penataan ruang ⁶:

- a. Asas keterpaduan
- b. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c. Asas keberlanjutan
- d. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. Asas keterbukaan
- f. Asas kebersamaan dan kemitraan
- g. Asas perlindungan kepentingan umum
- h. Asas kepastian hukum dan keadilan
- i. Asas akuntabilitas

Disediakannya ruang terbuka hijau di tengah-tengah kawasan perkotaan bukanlah tanpa tujuan karena mengingat fungsinya yang sangat penting bagi kualitas hidup di areal perkotaan. Tujuan diadakannya ruang terbuka hijau di areal perkotaan adalah sebagai berikut⁷ :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan

⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

⁶ Pasal 2 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Mengingat bahwa ruang terbuka hijau merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu areal perkotaan maka tentunya ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang cukup vital, sebagai berikut⁸.

- a) Fungsi lingkungan/*ecology* adalah untuk menjaga kelangsungan lingkungan itu sendiri. Selain itu, dengan adanya ruang terbuka hijau juga dapat mencegah terjadinya banjir dikarenakan ruang terbuka hijau mampu untuk menyerap atau menampung sejumlah debit air
- b) Fungsi sosial budaya adalah bahwa ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan sarana untuk bertukar pikiran.
- c) Fungsi *aesthetic* atau estetika, melalui keberadaan taman dan jalur hijau, ruang terbuka hijau diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan kawasan dan nilai keindahan
- d) Fungsi ekonomi, ruang terbuka hijau diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan. Dengan adanya hal tersebut tentunya akan menarik wisatawan local maupun wisatawan asing yang kemudian secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian yang berasal dari kawasan wisata.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang mana penulis akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni mengenai implementasi Perda RTRW Kota Malang. Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*)⁹

Sifat Penelitian

⁸ Samsudi “ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan kota Surakarta”, dalam jurnal of rural and development volume 1 no 1 februari 2010, (Surakarta:UNS), hlm 13-14

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 134

Sifat penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat ¹⁰.

Data dan Sumber Data

- a. Data primer : data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yang didapatkan sendiri oleh penulis dengan metode wawancara dengan narasumber dari instansi-instansi terkait yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dituju oleh penulis adalah :
 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang
 4. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang
- b. Data sekunder : antarlain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹¹.
Data sekunder berbentuk bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal penelitian, berita, dll).
Data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan berasal dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2011 – 2030

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

¹⁰ Ibid hal 25

¹¹ Loc.cit Soerjono Soekanto

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian¹². Berikut adalah daftar tiap instansi beserta narasumber dan ruang lingkup pertanyaan yang diajukan kepada narasumber :

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang : wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Ir Endah Setiyowati selaku Kepala Seksi Pengembangan Taman. Dalam wawancara dengan ibu Endah, peneliti menanyakan mengenai upaya penambahan ruang terbuka hijau dan upaya-upaya yang dilakukan untuk merawat sejumlah ruang terbuka hijau yang saat ini ada di Kota Malang.
- b. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang : wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Ratri (Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah). Dalam wawancara dengan ibu Ratri, peneliti menanyakan perihal rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal penambahan atau *re*-fungsi sejumlah RTH yang ada di Kota Malang. turut ditanyakan mengenai hubungan antara upaya penambahan dan *re*-fungsi RTh dengan tujuan peningkatan kualitas hidup di Kota Malang.

Obserbvasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia¹³. Proses observasi bergerak melalui rangkaian

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 84

¹³ Adler dan Adler dalam Hasyim Hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)”, dalam jurnal *at-taqaddum*, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 26

aktivitas bervariasi, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasionalnya¹⁴.

Observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Observasi pada ruang terbuka hijau yang tidak terawat
- b. Observasi pada ruang terbuka hijau dalam berbagai jenis
- c. Observasi sejumlah pelanggaran yang terjadi di beberapa ruang terbuka hijau

Library Research

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁵. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya¹⁶. Data sekunder nantinya akan diperoleh pada saat atau setelah adanya wawancara dikarenakan dalam wawancara tentunya akan didapatkan data baik berupa informasi maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penulis. Dokumen yang diharapkan oleh penulis adalah berupa denah lokasi RTH (publik maupun privat) yang ada di Kota Malang, data perubahan suhu di Kota Malang (5 Tahun terakhir), serta dokumen-dokumen lain yang dapat menunjang penelitian penulis

¹⁴ Hasyim Hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)”, dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 31

¹⁵ Nursapia Harahap “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal *iqra*’ volume 8, no 1, mei 2014, (Medan : IAIN-SU Medan) hlm 68

¹⁶ Sutrisno Hadi dalam Nursapia Harahap “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal *iqra*’ volume 8, no 1, mei 2014, (Medan : IAIN-SU Medan) hlm 68

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang 2010-2030 (Penambahan Jumlah RTH)

Dalam pemenuhan ruang terbuka hijau agar memenuhi ketentuan minimum 30% dari luas daerah, pemerintah daerah di masing-masing daerah tentunya telah menyiapkan strategi-strategi dan rencana-rencana yang baik melalui kebijakan yang dibuat. Seperti halnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang dalam uapayanya menambah ruang terbuka hijau yang ada. Rencana tersebut tertuang dalam beberapa bentuk yakni dalam Perda Kota Malang No 4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 dan dalam buku aksi penambahan RTH yang disusun oleh Badan Perencanaan, Pengembanganm, dan Penelitian Kota Malang (Barenlitbang). Dalam Perda RTRW Kota Malang, dasar perencanaan penambahan luasan ruang terbuka hijau di Kota Malang tertera pada pasal 45 ayat 4 dan ayat 5 Perda RTRW Kota Malang. Rencana penambahan jumlah RTH tersebut adalah sebagai berikut :

a) Untuk ruang terbuka hijau publik, Pemerintah Kota Malang harus menyediakan ruang kurang lebih seluas 2350Ha (20% dari luas Kota Malang) yang terdiri dari :

- 1) 3,5 Ha taman kota;
- 2) 10 Ha taman rekreasi;
- 3) 11 Ha hutan kota;
- 4) 0,04 Ha cagar alam;
- 5) 173 Ha pemakaman;
- 6) 166 Ha lapangan plahraga dan lapangan upacara;
- 7) 192 Ha jalur sutet;
- 8) 225 Ha sempadan air;
- 9) 283 Ha Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan trotoar;
- 10) 24 Ha Kawasan dan jalur hijau/median jalan;

- 11) 1.263 Ha lahan yang diserahkan oleh developer.
- b) Untuk ruang terbuka hijau privat, Pemerintah Kota Malang harus menyediakan ruang kurang lebih seluas 1383Ha

Dalam rencana aksi yang dikeluarkan oleh Barenlitbang, terdapat sejumlah kebijakan-kebijakan dan strategi penambahan luas ruang terbuka hijau untuk berbagai jenis ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang. Rencana aksi tersebut di klaim oleh Barenlitbang dimaksudkan sebagai bentuk implementasi dari pasal 45 ayat 4 dan ayat 5 Perda RTRW Kota Malang. Kebijakan-Kebijakan dan strategi penambahan ruang terbuka hijau yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut ¹⁷:

1. Kebijakan : mewujudkan RTH publik 20%

Strategi :

- a. Menetapkan lahan-lahan potensial RTH untuk tidak boleh dibangun melalui legalitas daerah
 - b. Meningkatkan kualitas RTH yang ada melalui refungsi
 - c. Mengembangkan koridor ruang hijau di kawasan perkotaan pada Kota Malang
 - d. Menguasai lahan baru melalui pembelian lahan untuk dijadikan RTH daerah
 - e. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting
 - f. Menghijaukan bangunan (green roof/green wall)
 - g. Menyusun kebijakan hijau
 - h. Melakukan kerjasama dengan swasta untuk mewujudkan RTH Kota Malang
 - i. Melakukan kegiatan publikasi mengenai penerapan konsep kota hijau yang dilakukan oleh semua pihak
 - j. Memberdayakan komunitas hijau
2. Kebijakan : meningkatkan RTH publik pada lokasi prioritas

Strategi :

¹⁷ Hasil Penelitian di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan pada tanggal 21 Juni 2018

- a. Melakukan peningkatan kualitas RTH melalui refungsi dalam bentuk penataan kawasan di lokasi dengan karakteristik dan konsep yang telah disusun
 - b. Melakukan peningkatan minat baca dengan bentuk perpustakaan keliling yang ditempelkan pada penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan RTH yang akan ditata
 - c. Melakukan kerjasama dalam bentuk partisipasi swasta untuk mewujudkan RTH di lokasi rencana
 - d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemeliharaan kawasan RTH yang telah ditata
3. Penetapan kesesuaian spasial (keruangan) lokasi RTH publik

Strategi :

- a. Menyediakan RTH sesuai dengan perencanaan tata ruang Kota Malang
 - b. Pemkot Malang menyediakan dan memanfaatkan areal RTH sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut : perencanaan, pengadaan lahan, perancangan Teknik, pelaksanaan pembangunan RTH, pemanfaatan dan pemeliharaan
 - c. Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembangan disesuaikan dengan ketentuan perijinan bangunan
4. Pembangunan ruang terbuka hijau publik untuk mendukung pencapaian RTH publik 20%

Strategi : Dalam rangka mewujudkan pencapaian RTH publik 20% di Kota Malang maka RTH potensial yang ada di Kota Malang dilakukan memaksimalkan fungsi sebagai pendukung tercapainya RTH publik 20%

5. Pembangunan RTH publik yang melibatkan peran serta stakeholders

Strategi : upayanya adalah dengan melibatkan komponen masyarakat di berbagai tahap perencanaan. Fungsinya adalah untuk menjamin dan melindungi adanya penyalahgunaan dan penyelewengan.

6. Pemberian penghargaan dan kompensasi dalam pengembangan RTH publik

Strategi : *reward* yang dimaksud adalah memberikan hadiah bagi siapa saja yang turut berperan dalam pengembangan RTH dan berperan untuk memupuk kesadaran masyarakat terhadap ruang hijau

Dalam upaya penambahan ruang terbuka hijau, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut antarlain adalah sebagai berikut :

1. Penentuan lokasi pengembangan RTH publik

Untuk menyusun perencanaan pengembangan RTH maka perlu diketahui areal yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai RTH. Analisis potensial areal untuk pengembangan RTH mengacu pada hasil analisis kebutuhan RTH berdasarkan proporsi luas wilayah untuk masing-masing kelurahan. Analisis ini mempertimbangkan kriteria prioritas penggunaan lahan, kriteria hasil analisis AHP (keberimbangan distribusi dan jarak terhadap pemukiman), kriteria luas minimal RTH berdasarkan skala pelayanan, kriteria kompleksitas bentuk lahan, kriteria pola ruang pada RTRW serta kriteria ketersediaan aset pada wilayah kelurahan. Kriteria tersebut merupakan variable yang digunakan dalam penyusunan prioritas dalam analisis potensi areal untuk pengembangan RTH. Penyusunan prioritas merupakan gabungan dari seluruh kriteria dengan mempertimbangkan keberimbangan distribusi antara wilayah kelurahan dan kecamatan. Untuk kelas prioritas 1 berpotensi untuk pengembangan RTH publik alih-fungsi sosial budaya, prioritas 2 untuk RTH publik pasif-fungsi sosial budaya, dan prioritas 3 untuk RTH publik pasif-fungsi ekologis

2. Penentuan prioritas pengembangan RTH publik

Pengembangan RTH di Kota Malang lebih diarahkan kepada RTH yang statusnya mendukung eksistensinya di masa akan datang. Selain mempertimbangkan eksistensinya, arahan pengembangan RTH juga dititikberatkan pada kebutuhan RTH yang paling besar. Terpenuhinya

kebutuhan RTH dengan luasan paling besar maka secara otomatis kebutuhan RTH dari pendekatan lainnya dengan luasan lebih kecil akan terpenuhi. Kebutuhan RTH dengan luasan lebih kecil dijadikan sebagai tujuan antara dalam mencapai target ahir yaitu kebutuhan dengan luasan yang paling besar. Lahan yang tersedia untuk pengembangan RTH di kota aMalang terdiri dari 3 alternatif yaitu : alternative pertama yaitu semak belukar dan rumput, alternative kedua adalah ladang/tegalan dan kebun campuran, alternate ketiga adalah tanah aset.

3. Potensi dan peluang pengembangan RTH publik

Dalam melakukan Analisa potensi dan peluang dalam pengembangan RTH publik yang ada di Kota Malang adalah dengan terlebih dahulu mengetahui potensi-potensi terkait RTH yang ada di Kota Malang, kemudian potensi tersebut dapat dilihat peluang yang dapat terjadi dari untuk pengembangan RTH publik Kota Malang

Dalam tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Malang lebih mengutamakan untuk menambah RTH publik karena jumlahnya yang lebih luas ketimbang RTH privat. adapun rencana penambahan RTH publik yang di susun oleh Pemerintah Kota Malang, antarlain :

a) Rencana pebangunan taman dan hutan kota

Rth taman yang terdapat di kota Malang seluas kurang lebih 46,873 ha, 2% dari luas rencana perumahan seluas 203,18 ha, dan pengembangan rth taman dan hutan kota pada sempadan sungai seluas 248,028ha. Rencana rth taman kota Malang adalah peningkatan peran masyarkat termasuk pengembang dalam penyediaan taman di lingkungan masing-masing

- b) Rencana pembangunan jalur hijau dan median jalan seluas 118,57 ha
- c) Rencana pembangunan RTH fungsi tertentu
 - 1. Sempadan sungai : 115,9 Ha
 - 2. Sempadan mata air : 26 Ha
 - 3. Sempadan SUTT : seharusnya 192,11 Ha , yang bisa dimanfaatkan 136,1Ha
 - 4. Sempadan rel kereta api : seharusnya 36,56Ha , yang bisa dimanfaatkan 18,58Ha
 - 5. Makam : 476,74 Ha

Dalam kaitannya dengan visi Kota Malang yakni “Kota Sehat dan Ramah Lingkungan”, ada beberapa poin penting yang dapat mewujudkan visi tersebut seiring bertambahnya jumlah RTH yang ada, antarlain :

- 1. Fungsi ekologis dari RTH adalah mengurangi polusi udara dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro, dengan semakin bertambahnya RTH maka tentunya angka polusi di Kota Malang bisa lebih ditekan sehingga udara di Kota Malang menjadi lebih bersih.
- 2. Fungsi ekologis lain dari RTH adalah mencegah terjadinya banjir. Dapat kita ketahui bahwa air banjir mengandung banyak sekali kuman yang dapat menjadi penyebab penyakit, jika banjir berkurang maka tentunya resiko terkena penyakitpun dapat berkurang. Selain itu warga akan merasakan kenyamanan bila tidak ada banjir, terutama bagi warga pengguna jalan.
- 3. RTH yang memiliki fungsi sosial budaya tentunya dapat menjadi tempat untuk bersosialisasi dan tempat untuk berinteraksi bagi warga Kota Malang. hal tersebut dapat menjadi sarana untuk menghilangkan penat atau sarana untuk bersantai setelah bekerja.
- 4. Ada beberapa jalur jalan di Kota Malang yang rawan akan kemacetan, dan tentunya jika terjebak kemacetan maka pengendara akan merasa stres/jenuh.

Dengan adanya fungsi estetik dari RTH maka hal tersebut dapat mengurangi rasa stres dan jenuh yang dialami pengendara selama terjebak kemacetan. jika dibandingkan dengan kondisi ketika tidak ada RTH yang tertata dengan baik, maka rasa stres/jenuh yang dialami pengendara bisa semakin bertambah.

Dalam Perda Kota Malang no 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menargetkan pemenuhan RTH sebanyak 30% pada tahun 2030, cukup lama jika dilihat awal dimulainya adalah pada tahun 2010 atau sekitar 20 tahun untuk memenuhi target tersebut. Pembangunan di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota berjalan berdasarkan pembangunan nasional, sedangkan jangka waktu pembangunan nasional sendiri adalah sekitar 20 tahun ¹⁸. Jangka waktu 20 tahun merupakan jangka waktu yang diberikan kepada Pemerintah guna memenuhi RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum waktu yang ditentukan, sejumlah daerah telah memenuhi RTH sebesar minimal 30% di tiap daerah.

Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang

Kota Malang merupakan kota besar yang memiliki beberapa jenis ruang terbuka hijau. Hampir semua jenis ruang terbuka hijau dapat kita temui, namun kita tidak dapat menemui ruang terbuka hijau berjenis *rooftop garden* di Kota Malang. adapun jenis-jenis ruang terbuka di Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. RTH privat

RTH jenis ini terdiri dari RTH pekarangan rumah, RTH pekarangan kantor, RTH pekarangan perdagangan dan jasa, RTH pelayanan umum

¹⁸ Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. RTH publik

- a) RTH taman lingkungan, taman kota, dan hutan kota
- b) RTH jalur hijau
- c) RTH pulau jalan dan median jalan
- d) RTH fungsi tertentu yang terdiri dari RTH sempadan sungai, RTH sempadan rel kereta api, RTH sempadan jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sumber air baku/mata air, dan RTH Makam

Dari beberapa jenis RTH publik diatas, maka total luasan RTH yang dimiliki

oleh Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. RTH taman lingkungan Hidup : 7,574 Ha
2. RTH sempadan sungai : 115,917 Ha
3. RTH taman kota : 16,356 Ha
4. RTH hutan kota : 4,695 Ha
5. RTH median dan pulau jalan : 19.093 Ha
6. RTH jalur hijau jalan : 2,809 Ha
7. RTH makam : 1285,57 Ha
8. RTH sempadan SUTT : 87,530 Ha
9. PSU perumahan : 6,85 Ha
10. RTH sempadan mata air : 26 Ha
11. RTH sempadan rel kereta api : 18,580 Ha

Dengan ini maka Pemkot Malang memiliki RTH publik dengan seluas 1342,95 Ha atau seluas 12,20% dari luas total wilayah Kota Malang . Dengan luasan tersebut, maka total RTH publik yang harus dipenuhi adalah 1007,04 Ha

Upaya Perlindungan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang

Mengingat pentingnya dan fungsinya yang sangat fital bagi areal perkotaan, harus ada upaya perlindungan dari pihak pemerintah daerah supaya jumlah RTH yang ada saat ini tidak semakin berkurang. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam perlindungan terhadap RTH adalah sebagai berikut :

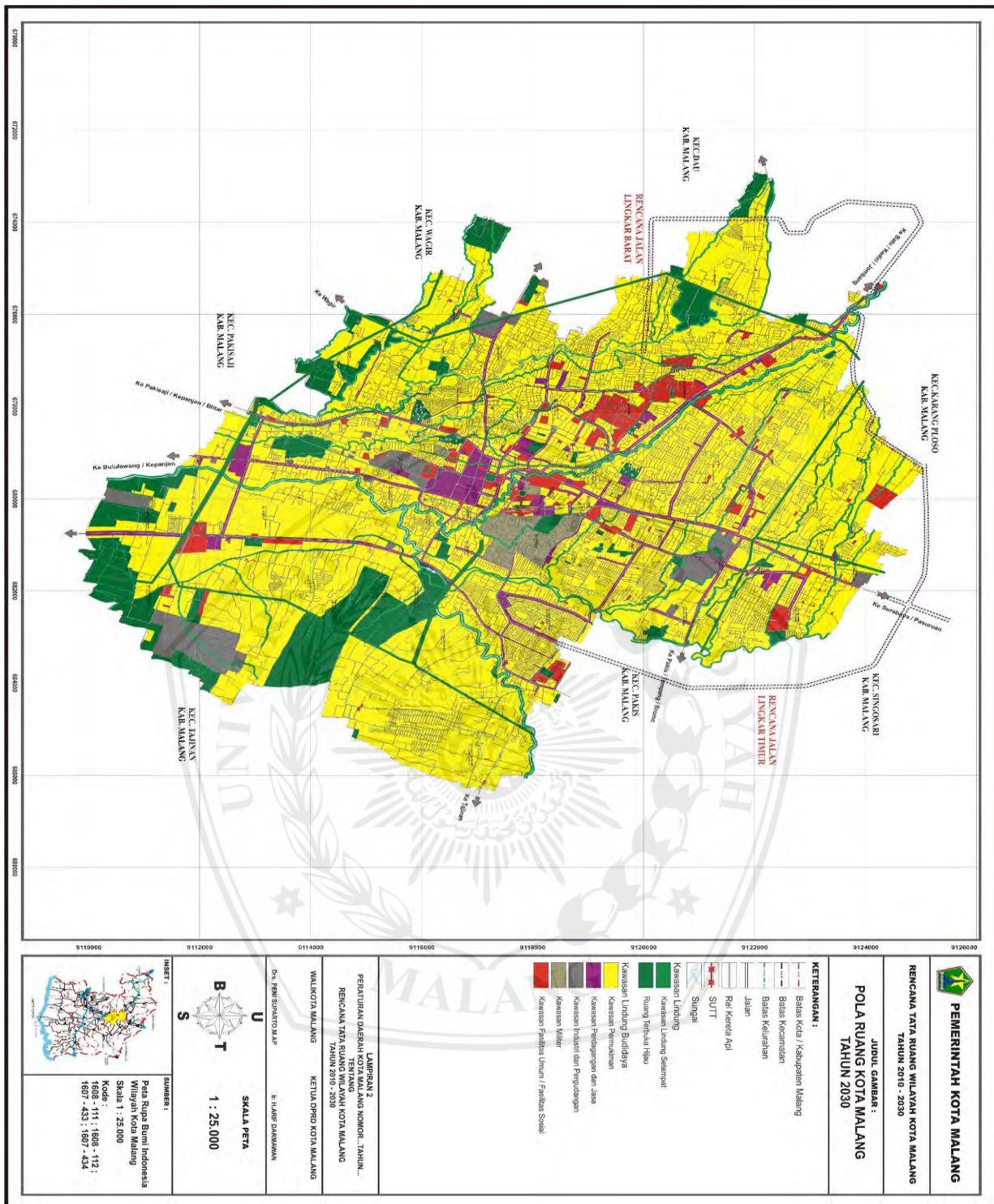
1. Menerapkan peraturan zonasi agar jumlah RTH tidak semakin berkurang

Ketentuan mengenai peraturan zonasi ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030. Dalam perda ini juga terdapat lampiran yang memuat peta zonasi¹⁹, peta zonasi tersebut berfungsi untuk mengetahui zona-zona yang ada di Malang seperti kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung setempat dan ruang terbuka hijau, serta kawasan lindung budaya yang terdiri dari kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri dan pergudangan, kawasan militer, dan kawasan fasilitas umum / fasilitas sosial. Berikut merupakan gambar dari peta zonasi Kota Malang²⁰:



¹⁹ Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030

²⁰ Lampiran 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030



Gambar 4.1
Peta Zonasi Kota Malang

2. Memberikan sanksi kepada pelanggar aturan zonasi

Peta zonasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, jika melakukan penyalahgunaan maka akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi bpagi pelanggar aturan zonasi yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah adalah pidana penjara 1 hingga 3 Tahun dan denda Rp 100.000.000 hingga Rp 5.000.000.000²¹.

3. Melakukan pengamanan aset²²

Pengamanan aset milik Pemerintah Daerah berupa RTH dilakukan melalui pengelolaan barang aset milik daerah. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Walikota selaku Kepala Daerah dan dibantu oleh²³:

- a. Sekertaris Daerah selaku pengelola
- b. Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola
- c. Kepala SKPD selaku pengguna
- d. Kepala UPT selaku panguasa pengguna
- e. Pengurus barang milik daerah

Ada beberapa bentuk upaya pengamanan aset milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. bentuk-bentuk pengamannan tersebut antaralain ²⁴:

- a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertipikat tanah, BPKB, dan dokumen lainnya)

²¹ Pasal 69 ayat 1, pasal 70 ayat 1, pasal 71, dan pasal 71 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

²² Hasil wawancara dengan ibu endah, narasumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 10 juli 2018

²³ Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

²⁴ Pasal 46 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pematokan/pemasangan tanda batas dan/atau tanda kepemilikan selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan
- d. Pengamanan hukum melalui upaya hukum meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan

Bentuk perlindungan terhadap RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang tidak hanya berupa perlindungan melalui norma hukum melainkan juga melindungi sejumlah RTH agar fungsi dari RTH tersebut tidak terganggu. Bentuk perlindungan lain terhadap RTH adalah dengan dilakukannya perawatan secara berkala untuk menjaga fungsinya. Perawatan berkala dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan hidup dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1. Melakukan penyisiran sampah
- 2. Perontokan daun kering
- 3. Penyapuan
- 4. Penggetesan
- 5. Pendangiran (menyuburkan tanah)
- 6. Pengendalian gulma
- 7. Pengumpulan sampah

Dengan adanya perawatan berkala setiap harinya, maka tentunya keindahan dan keberadaan RTH di Kota Malang akan tetap terjaga sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik.

Mengenai perlindungan terhadap RTH ini sendiri, nampaknya masih banyak hal yang masih menjadi pertanyaan besar hingga saat ini. Meskipun saat ini

Pemerintah Kota Malang sedang gencar menambah dan merawat sejumlah RTH yang ada, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menjadi perdebatan yang cukup layak untuk diangkat kembali. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya berkaitan dengan pengalihan fungsi RTH yang sebelumnya pernah terjadi di Kota Malang. Yang pertama adalah perubahan status areal RTH menjadi areal perbelanjaan. Sempat ramai diperbincangkan adalah pendirian pusat perbelanjaan terbesar di Kota Malang saat ini yang tempatnya bersebrangan dengan Universitas Negeri Malang. Pendirian pusat perbelanjaan tersebut sempat mendapat pertentangan di kalangan masyarakat dikarenakan tanah tempat dibangunnya pusat perbelanjaan tersebut adalah areal resapan air. Dengan kata lain, areal yang dijadikan sebagai tempat pembangunan pusat perbelanjaan tersebut adalah merupakan areal RTH. Permasalahan kedua yakni peremajaan sejumlah RTH yang ada, salah satu contohnya adalah peremajaan Lapangan Rampal. Lapangan Rampal dahulunya adalah areal resapan air yang berguna untuk menampung sejumlah debit air sehingga mengurangi resiko banjir. Namun beberapa tahun lalu Lapangan Rampal yang berlokasi di Jl Ronggolawe telah direnovasi menjadi sarana olahraga keluarga. Ketika dikonfirmasi kepada pihak terkait mengenai permasalahan “apakah perenofasian tersebut tidak mengurangi fungsinya?” , muncul jawaban bahwa hal tersebut tidak sedikitpun mengurangi fungsi dari Lapangan Rampal justru dengan adanya renovasi maka fungsi dari Lapangan Rampal akan bertambah menjadi resapan air sekaligus sarana olahraga keluarga. Namun perlu diketahui, luasan areal resapan air di Lapangan Rampal akan menurun ketika di aspal/di cor. Mengapa demikian? Air akan sangat susah menembus lapisan padat seperti semen/aspal.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas dan dipaparkan pada bab pembahasan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

a) Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030

1. Dalam upayanya untuk mengimplementasikan isi pasal 45 ayat 4 dan ayat 5 Perda RTRW Kota Malang, Pemerintah Kota Malang terlihat cukup serius untuk melakukan penambahan luas ruang terbuka hijau di Kota Malang. hal tersebut tercermin dari berbagai hal misalnya penetapan kebijakan-kebijakan dan membuat strategi supaya kebijakan yang diambil dapat berjalan sesuai dengan rencana. Akan berbeda hasilnya jika Pemerintah Kota Malang hanya merumuskan suatu kebijakan namun tanpa disertai dengan strategi. Tentu hal tersebut akan berdampak besar pada kebijakan itu sendiri. Dengan adanya kebijakan dan strategi untuk menjalankan kebijakan tersebut, tentunya Pemerintah Kota Malang berharap agar pada tahun 2030 nanti Kota Malang tidak memiliki “hutang” kepada pemerintah.
2. Guna melakukan penambahan ruang terbuka hijau, tentunya Pemerintah Kota Malang harus menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pembangunan dan penambahan ruang terbuka hijau. Dengan melakukan penganalisaan faktor-faktor tersebut, tentunya hal tersebut turut menjadi faktor pendorong upaya Pemerintah

Kota Malang untuk mengoptimalkan beberapa tempat yang seharusnya bisa dikembangkan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau.

3. Pada tahun 2018 ini, sudah ada beberapa contoh bentuk upaya pemerintah Kota Malang dalam menambah dan memfungsikan sejumlah aset pemerintah yang sebelumnya tidak terpakai atau yang sebelumnya fungsinya tidak dapat dirasakan oleh orang banyak. Contoh-contoh hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah peremajaan lapangan rampal dan peremajaan sejumlah pulau jalan dan median jalan yang tentunya akan dapat menambah keindahan di sepanjang jalan di Kota Malang.

b) Jenis-jenis ruang terbuka hijau di Kota Malang

1. Terdapat banyak jenis RTH di Kota Malang, namun ada beberapa jenis RTH yang masih belum tersedia di Kota Malang yakni RTH dalam bentuk *rooftop garden* dan RTH yang berada di bawah jembatan layang
2. Jika dilihat dari data-data luas RTH yang ada di Kota Malang, jenis RTH yang mempunyai ukuran paling luas adalah RTH pemakamandengan luas 1285,57 Ha. Tidak heran bahwa RTH makan menjadi RTH paling luas karena di setiap wilayah bagian perkotaan kita dapat dengan mudah menemukan areal pemakaman.

c) Upaya perlindungan terhadap ruang terbuka hijau di Kota Malang

1. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Kota Malang. Guna melindungi aset tersebut, Pemerintah Kota Malang melakukan upaya perlindungan dengan bentuk perlindungan dengan menetapkan zona-zona yang mana zona-zona tersebut tidak dapat

diubah fungsinya. Namun perlu digarisbawahi bahwa masih terdapat banyak aset yang dimiliki oleh Pemerintha Kota Malang yang bertbentuk tanah kosong yang masih belum jelas kegunaannya.

2. Dalam upaya perlindungan dan upaya mempercantik sejumlah RTH yang ada, langkah kongkrit telah ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Malang dengan berbagai macam cara seperti perawatan berkala yang dilakukan setiap hari dan membangun sejumlah RTH guna menambah fungsinya (contoh : lapangan rampal)

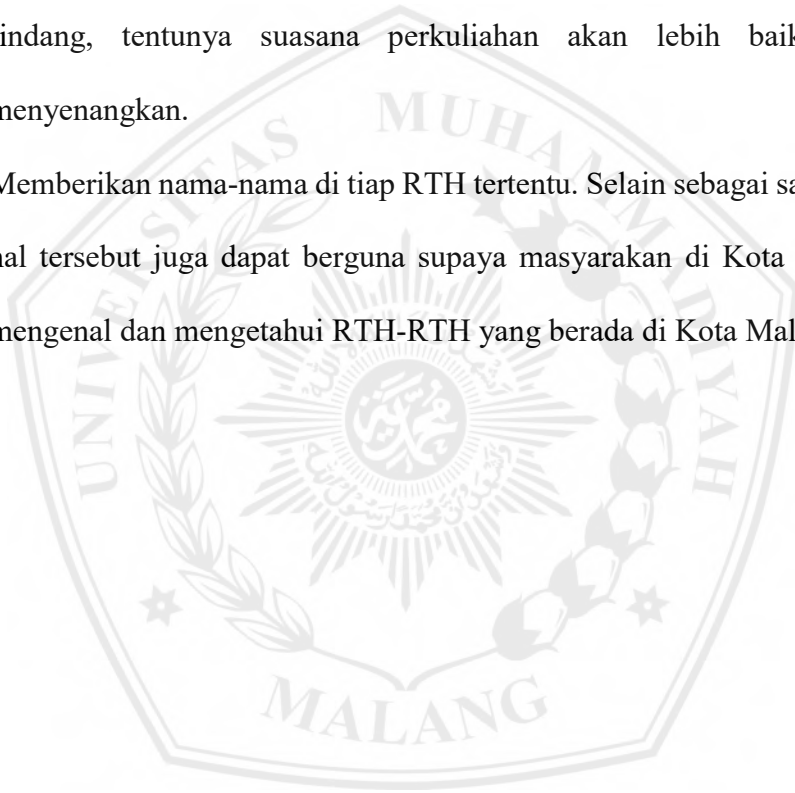
Saran

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah didapatkan oleh penulis, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam kebijakan dan strategi yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang masih kurang memanfaatkan masyarakat untuk turut serta membantu kinerja Pemerintah Daerah. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yang pertama adalah agar Pemerintah Daerah Kota Malang lebih merangkul masyarakat guna membantu dan mensupport kebijakan-kebijakan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota Malang. Untuk merangkul masyarakat, tentunya diperlukan adanya penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat yang bersifat mengajak warga Kota Malang untuk berperan aktif menjaga dan melestarikan sejumlah RTH yang ada di Kota Malang.
2. Perihal transparansi informasi pembangunan. Memang dalam hal ini tidak semua informasi harus dipublikasikan karena diawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Setidaknya dalam

sistem informasi penataan ruang turut disediakan informasi kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang.

3. Supaya jumlah RTH dapat bertambah secara signifikan, pihak Pemerintah Kota Malang sebaiknya bekerjasama dengan Universitas-Universitas di Kota Malang untuk lebih mengembangkan lingkungan hijaunya karena pada lingkungan tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan upaya penghijauan atau reboisasi supaya lebih rindang. Dengan tempat yang rindang, tentunya suasana perkuliahan akan lebih baik dan lebih menyenangkan.
4. Memberikan nama-nama di tiap RTH tertentu. Selain sebagai sarana edukasi, hal tersebut juga dapat berguna supaya masyarakat di Kota Malang lebih mengenal dan mengetahui RTH-RTH yang berada di Kota Malang



Daftar Pustaka

Buku :

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Jurnal :

Harahap Nursapia “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal *iqra*’ volume 8, no 1, mei 2014,(Medan : IAIN-SU Medan)

Hasanah Hasyim “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016

Rizki Yuliansyah dalam jurnal “Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pasuruan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008”, *jurnal swara bumi* volume IV Nomor V Tahun 2017

Samsudi “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta”, dalam *jurnal of rural and development* volume 1 no 1 februari 2010, (Surakarta:UNS)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3 angka 18
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030